



## Anggaran Meningkatkan

**PROYEK** Uni Eropa dan World Vision yang diimplementasikan oleh Wahana Vision Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kalimantan Barat.

Doseba T. Sinay Direktur Nasional WVI mengatakan, selama empat tahun World Vision Jerman dan Wahana Viši Indonesia (WVI), bersama dengan Uni Eropa (UE), telah membantu masyarakat Kalbar di 50 desa, 10 kecamatan dan tiga kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Program ini menerima

dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 – ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Hasilnya ada tiga kabupaten Sintang, Melawi dan Se-

■ Bersambung ke hal. 10

## Anggaran Meningkatkan

Sambungan Hal.9

kadau yang berkomitmen untuk menjadi kabupaten layak anak, sehingga anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun sesuai dengan tujuan proyek.

“Layanan Puskesmas telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 posyandu dan puskesmas,” ujarnya.

Ia mengatakan partisipasi organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program.

Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan tahun

2016 telah meningkat dari Rp 174 miliar atau 9,51% dan pada 2019 menjadi Rp 307 miliar atau 15,84 persen.

Di Melawi meningkat tahun 2016 dari Rp 121 miliar atau 10,91 persen menjadi Rp 157 miliar atau 13,44 persen pada tahun 2019.

Sementara di Sekadau meningkat dari Rp 58 miliar atau 7,07% pada 2016 menjadi Rp 70 miliar atau 8,14% di 2019.

“Peningkatan alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan biaya operasional Puskesmas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, terutama anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menurutnya, meskipun program tidak dapat mengendalikan anggaran kabu-

paten, kenyataannya telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten sasaran melalui upaya koalisi OMS.

Selain itu, koalisi organisasi masyarakat sipil telah berhasil merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan beberapa peraturan daerah seperti Pembaruan Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Sintang, Melawi dan Sekadau.

Hal ini pun lanjutnya, diperkuat dengan Peraturan Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi 2018-2021 di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi. (ang)